

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2023

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu melaksanakan penilaian mandiri indeks reformasi hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri indeks reformasi hukum, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 687);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 untuk memberikan penilaian secara mandiri khusus bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Mandiri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Mandiri sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Asesor, dan Tim Kerja dengan tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap penilaian mandiri indeks reformasi hukum khusus bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Tim Asesor terdiri atas:
 - a. Koordinator Tim Asesor bertugas:
 - 1) memastikan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan sasaran;
 - 2) memonitor penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - 3) menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Tim Asesor bertugas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
3. Tim Kerja bertugas:
 - a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; dan
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KETIGA : Tim Penilai Mandiri melaksanakan tugas pada Diktum KEDUA sesuai dengan kalender kerja sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Tim Penilai Mandiri bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 82 Tahun 2022 tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Februari 2023

Plt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI
MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2023

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 Februari 2023

**TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2023**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama/ Jabatan
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Utama
2.	Koordinator Tim Asesor	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
3.	Tim Asesor	1. Rinaldi Morintosh 2. Rasmita Juliana Sitepu
4.	Tim Kerja	1. Ardian Hoppin Sitompul 2. Benny Leopold Dumais 3. Cherish Shery Desarya 4. Asih Riska Nurmasari 5. Yogie Prastiyans 6. Mahatmya Widyasri 7. Stephanus Karmel Nugraha Kopong Miten

Plt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM
PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2023

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 Februari 2023

KALENDER KERJA

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2023

No.	Kegiatan	Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengunggahan Data Dukung dan Verifikasi Penilaian Mandiri Dalam Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum								

Plt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA